



**Riwayat Artikel:**

*Diajukan: 22-02-2021*

*Ditelaah: 09-03-2021*

*Direvisi: 13-03-2021*

*Diterima: 15-03-2021*

**Ki Bagus Hadikusumo: Peran dan Pemikiran bersama Muhammadiyah dalam Penerapan Syariat Islam di Indonesia**

**Sri Lestariningsih\*, Wahyu Aminati, Siti Khoiriyah, Anna Fatonah**

**DOI:**

10.18196/jasika.v1i1.11366

Magister Ilmu Agama Islam, Program Pascasarjana,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia  
Korespondensi: tariyanno@gmail.com

**Abstrak**

*Tulisan ini merupakan paparan mengenai Ki Bagus Hadikusumo, peran serta pemikirannya bagi Indonesia. Sebagaimana negara terjajah lainnya, Indonesia mengalami ketidakbebasan dalam berbagai hal baik dalam kehidupan sosial hingga politik. Hal ini mendorong Ki Bagus Hadikusumo untuk memberikan peran yang besar bagi negara. Sebagai seorang muslim, sikap tegas beliau tentang tauhid begitu besar. Peran Ki Bagus Hadi Kusumo dimulai dari studinya di berbagai Lembaga pendidikan, persyarikatan Muhammadiyah hingga dalam perumusan dasar negara. Penjelasan mengenai Biografi, peran Muhammadiyah dalam kemerdekaan Indonesia, peran Muhammadiyah dalam politik (Masyumi), sikap Ki Bagus Hadikusumo mengenai seikerei hingga pemikiran Ki Bagus Hadikusumo mengenai Islam dan Negara merupakan hal yang disampaikan dalam tulisan ini. Metode pengumpulan informasi tulisan ini menggunakan studi literatur guna mendapatkan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kontekstual sehingga membentuk suatu keterkaitan.*

**Kata kunci :** dasar negara; masyumi; seikerei

**Abstract**

*This paper is a description of Ki Bagus Hadikusumo, his role and thoughts for Indonesia. Like other colonized countries, Indonesia experienced lack of freedom in various ways, both in social and political life. This prompted Ki Bagus Hadikusumo to give a big role to the state. As a Muslim, his firm stance on monotheism was great. The role of Ki Bagus Hadi Kusumo started from his studies at various educational institutions, Muhammadiyah organizations to the basic formulation of the state. Explanations on Biography, Muhammadiyah's role in Indonesia's independence, Muhammadiyah's role in politics (Masyumi), Ki Bagus Hadikusumo's attitude regarding seikerei to Ki Bagus Hadikusumo's thoughts on Islam and the State are things that are conveyed in this paper. The method of collecting information in this paper uses literature studies to obtain secondary data which is then analyzed contextually to form a relationship.*

**Keywords:** national foundation; aasyumi; seikerei

**1. Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan sebutan Hindia Belanda merupakan daerah jajahan bangsa Barat. Sebagai negara jajahan, Indonesia mengalami keadaan yang buruk. Banyaknya tekanan dari penjajah membuat rakyat Indonesia takhluk pada

pemerintahan Belanda. Tidak ada hak untuk berpendapat, melawan, ataupun berpolitik. Pada masa penjajahan Belanda, politik kolonial mengikuti kepentingan dan kekuasaan kolonial yang merugikan bangsa jajahannya.<sup>1</sup> Adanya penjajahan membawa perubahan berbagai bidang seperti halnya sistem pemerintahan, industri, transportasi, dan pendidikan. Perubahan tersebut yang mengakibatkan rakyat Indonesia sadar akan sebuah bangsa dan tanah air yang kemudian melahirkan nasionalisme. Sifat nasionalisme yang tinggi membuat munculnya organisasi-organisasi modern yang dibentuk guna memberikan perlawanan rakyat Indonesia kepada kolonial Belanda lebih terorganisir. Pergerakan-pergerakan nasional menentang kolonial untuk membangun Indonesia.<sup>2</sup> Diawali dengan lahirnya Boedi Uetomo, Sarekat Islam dan Pasundan yang membawa lambang identitas kebangsaan.<sup>3</sup>

Muhammadiyah merupakan salah satunya dan dijadikan sebagai agen perubahan yang menginginkan gerakannya sebagai gerakan Islam non-politik, tetapi tidak anti politik.<sup>4</sup> Rakyat Indonesia dipersulit belajar, hanya kaum priyayi yang diperbolehkan oleh kaum penjajah.<sup>5</sup> Muhammadiyah muncul sebagai organisasi sosial kebudayaan yang peduli dan prihatin terhadap pendidikan rakyat sehingga rintisan amal usaha pada awal berdirinya adalah dengan mendirikan sekolah yang dapat dinikmati oleh semua kalangan rakyat Indonesia. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam, tidak anti politik sehingga Muhammadiyah mampu tumbuh menjadi organisasi yang besar dan diterima oleh seluruh golongan. Munculnya Muhammadiyah pada masa penjajahan, tidak membuat gerakan ini tunduk dan patuh pada pemerintahan. Budaya Islam dan budaya Barat yang sangat berbeda menjadikan masyarakat menginginkan budaya Indonesia yang ada tersebut tidak dicampur dengan budaya barat yang dominan dan lebih bebas.

Muhammadiyah berdiri dan tumbuh menjadi organisasi besar tidaklah lepas dari peran perjuangan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ikut andil di dalamnya salah satunya yaitu Ki Bagus Hadikusumo, tokoh besar Muhammadiyah yang muncul dan mempunyai andil besar kepada bangsa Indonesia terutama kepada Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo merupakan salah satu tokoh yang tidak akan pernah berhenti berjuang untuk melawan penjajah yang telah memporak-porandakan ajaran Islam dan membiarkan negaranya berdiri tanpa pondasi yang kuat.<sup>6</sup> Ki Bagus Hadi Kusumo menjalankan perannya sebagai ketua Muhammadiyah dengan pemikiran-pemikiran yang modern. Tidak hanya mementingkan keagamaan saja, tetapi juga membantu proses kemerdekaan Indonesia. Berpegang teguh dengan keIslamannya, dalam momen-momen kenegaraan Ki Bagus Hadikusumo berani mengungkapkan pendapatnya yang berbeda dengan tokoh-tokoh nasional lainnya (Mahfud MD: 2013).

---

<sup>1</sup> Kartodirjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2. (Jakarta: Gramedia, 1999), 40.

<sup>2</sup> Moedjanto, G. 1998. Indonesia Abad Ke-20 1: Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati. (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 27.

<sup>3</sup> Kartodirjo, Sartono. 2005. Sejak Indische sampai Indonesia. (Jakarta: Kompas, 1998), 3

<sup>4</sup> Syaifullah. Pergeseran Politik Muhammadiyah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 173.

<sup>5</sup> Engelen O. E, dkk. 1997. Lahirnya Satu Bangsa dan Negara. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997), 2-3.

<sup>6</sup> Hadikusuma, Djarnawi. 1979. Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo. (Yogyakarta: Persatuan., 1979), 26.

## 2. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa penelitian literatur yang berisi rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat kemudian mengolah bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan *primary source* dan *secondary source*. *Primary source* berupa tesis, disertasi serta laporan penelitian sedangkan *secondary source* yang berupa tulisan mengenai penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan serta tulisan-tulisan sejenis tentang hal-hal yang tidak langsung disaksikan maupun dialami sendiri oleh penulis.

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara analisis konten atau analisis isi yang berupa analisis yang menitikberatkan pada kajian dan interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan penelitian ini berupa buku teks, literatur dan artikel yang terpublikasikan dan memiliki kredibilitas tinggi. Analisis isi merupakan dilakukan dengan pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.<sup>7</sup> Langkah penelitiannya dilakukan sebagai dengan cara penetapan desain, pencarian data pokok serta pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan saling berkaitan. Tempat penelitian ini adalah di Yogyakarta dan dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2021.

## 3. Hasil dan Pembahasan.

### 3.1. Muhammadiyah dan Kemerdekaan Indonesia

Kemerdekaan Indonesia diraih salah satunya berkat jasa Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo sebagai salah satu tokoh Muhammadiyah ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Politik menurut Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu cara untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan suatu Negara atau sebuah seni untuk mengelola masyarakat melalui berbagai keputusan dan tindakan untuk tercapainya cita-cita ideologi negara karena negara adalah karunia Allah yang dilimpahkan kepada sebuah bangsa yang memiliki sifat Jumhuriyah demi menjamin berlakunya syariat Islam.<sup>8</sup>

Gerakan politik Islam dikalangan muslimin identik dengan pertumbuhan Sarekat Islam. Perkembangan Sarekat Islam dibagi dalam empat bagian yaitu periode pertama pada tahun 1911-1916 yang memberikan corak dan bentuk bagi Partai Persatuan Muslimin Indonesia. Pada periode kedua yaitu tahun 1916-1921 yang merupakan periode puncak. Periode ketiga pada tahun 1921-1927 yang merupakan periode konsolidasi dimana Partai Persatuan Muslimin Indonesia bersaing keras dengan golongan komunis dan mengalami tekanan dari Kolonial Belanda. Periode keempat pada tahun 1927-1942 yang menunjukkan usaha Partai Persatuan Muslim Indonesia untuk tetap mempertahankan eksistensinya di forum politik Indonesia.

Tahun 1922 gerakan nasional keseluruhan Sarikat Islam tidak lagi menempati posisi yang menentukan seperti dahulu. Menurunnya Partai Persatuan Muslimin Indonesia disebabkan oleh perubahan hubungan dengan partai-partai lain yang tidak

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 175

<sup>8</sup> Irfan S. Awwas Trilogi, Kepemimpinan Negara Islam Indonesia (Yogyakarta: Uswah, 2008). 123.

bersahabat lagi seperti periode sebelumnya. Peran Sarekat Islam sebagai suatu perkembangan partai tidak dapat diharapkan bahwa partai Islam hanya sebagai penonton problematika masyarakat Islam pada umumnya. Partai Sarekat Islam mempunyai pemikiran pembaharuan dalam agama, namun Partai Sarekat Islam kurang terlibat dalam masalah-masalah yang diperdebatkan antara pihak pembaharu (Kaum Muda) dan pihak tradisi (Kaum Tua) dibandingkan dengan orang-orang ataupun organisasi yang membatasi diri mereka pada bidang social dan pendidikan. Dalam masa mundurnya Sarekat Islam masih mempunyai pengikut-pengikut yang lebih banyak dari organisasi Islam manapun pada saat itu.

Tahun 1926 terjadi pertikaian antara Sarekat Islam dengan Muhammadiyah yang menyebabkan pihak Sarekat Islam mengambil langkah disiplin terhadap Muhammadiyah dengan memberi pilihan yaitu bahwa anggota Muhammadiyah akan dikeluarkan dari partai jika mereka masih anggota Muhammadiyah, dalam artian mereka harus meninggalkan Muhammadiyah. Saat itu Sarekat Islam berusaha untuk memonopoli persoalan khilafah dengan menganggap dirinya sebagai satu-satunya wakil Islam Indonesia dengan mengubah Majelis A'la Islam Syarqiyah sebagai bagian dari partai.<sup>9</sup> Nama Sarekat Islam diubah menjadi Partasi Syarikat Islam Indonesia pada tahun 1930. Sarekat Islam pecah menjadi beberapa partai kecil diantaranya Penyadar dan Komite Kebenaran PSII. Pada tahun ini Sarekat Islam mulai melemah karena terjadi perselisihan antar anggota-anggotanya dan persaingan dengan kelompok seperti Penyadar dan Komite Kebenaran dan berdirinya Partai Islam Indonesia pada tahun 1937. Kedudukan yang melemah mencerminkan peranan partai dalam gerakan nasional. Dalam bidang agama Partai Sarekat Islam terus aktif namun tidak dapat mempertahankan kepemimpinannya seperti periode sebelumnya.<sup>10</sup>

Munculnya pemikiran nasional di kalangan para pembaharu di Indonesia tidak mengurangi rasa persatuan dan kesatuan umat Islam. Tidak ada pemikiran di kalangan modern bahwa politik selain khilafah tidak sesuai dengan Islam. Islam sesuai dengan nasionalisme dan memupuk rasa kebangsaan. Di sisi lain, kekalahan Jepang terhadap sekutu memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkannya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Kantor Urusan Agama mengganti *Kantoor voor het Inlandsche Zaken* yang sudah ada sejak zaman Belanda. Kantor Urusan Agama yang semula dijabat oleh Kolonel Hori dari tentara Jepang, pada tanggal 1 Oktober 1943 diserahkan kepada Hoesein Djajadiningrat. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 1944 dipimpin oleh KH. Hasjim Asj'ari. Pada saat itu terjadi pembentukan Masyumi yang merupakan singkatan Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang dipandang sebagai pengganti Majelis Islam A'la Indonesia. Posisi kepemimpinan dari Masyumi mendapat dukungan yang rata dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Pada akhir tahun 1944 dibentuk Hizbullah yang merupakan organisasi militer bagi para pemuda muslim. Pendudukan Jepang telah mengakhiri masa kolonial Belanda

---

<sup>9</sup> George McT Kahin, *Nasionalisme and Revolution in Indonesia* (Ihaca NY: Cornell University Press, 1952). 75.

<sup>10</sup> George McT Kahin, *Nasionalisme and Revolution in Indonesia* (Ihaca NY: Cornell University Press, 1952). 85.

dan Jepang menjanjikan kemerdekaan yang masih samar-samar kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengulangi kembali janji mereka untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 7 September 1945 para pemimpin Masyumi mengundang anggotanya untuk persiapan membebaskan Indonesia dari Jepang salah satunya adalah pembentukan Hizbullah.

Hizbullah mendapatkan mandat untuk menyelidiki apa saja yang harus dipersiapkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah dengan membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Widjodiningrat yang beranggotakan 62 orang. Namun kalangan Islam yang beraspirasi hanya 15 orang dan Muhammadiyah diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Abdul Kahar Muzakir, dan K.H. Mas Mansur. Sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 mempunyai sebuah agenda penting yaitu pembentukan Dasar Negara Indonesia. Moh. Yamin menyampaikan sebuah pidato yang merupakan rancangan falsafah negara Indonesia yang dimuat dalam lima sila yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat. Ada perbedaan pendapat tentang lima sila falsafah negara yang inti masalahnya struktur negara (negara kesatuan atau negara federal), persoalan hubungan antara negara dan agama, dan persoalan apakah negara republik atau kerajaan. Pada sidang pertama BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan pidatonya dengan diawali surat Al-Fatihah dan membawa kertas kuning berisi ketikan. Beliau menyampaikan ketidaksetujuannya bahwa agama tidak boleh dicampurkan dengan politik.<sup>11</sup> Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian diterbitkan dengan judul Lahirnya Pantja Sila.

Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dengan agenda bentuk negara. Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan bahwa negara dikepalai oleh seorang pemimpin yang tidak turun temurun dan disetujui oleh rakyat dengan pemerintah yang berdasarkan rakyat dan permusyawaratan. Nama republik disebutkan dalam bahasa Indonesia dengan singkat yaitu kedaulatan rakyat. Usulan Ki Bagus Hadikusumo tersebut mendapat 55 suara dan memilih bentuk republik, 6 suara memilih bentuk kerajaan, 2 suara memilih bentuk lain, dan 1 suara blanko. Total anggota sidang ada 64 suara.<sup>12</sup> Tanggal 11 Juli 1945 diambil keputusan mengenai wilayah negara baru dan membentuk 3 kepanitiaan yaitu Panitia Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan jumlah anggota 19 orang, Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso dengan jumlah anggota 23 orang, dan Panitia Keuangan dan Ekonomi yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta yang beranggotakan 23 orang. Ki Bagus Hadikusumo termasuk dalam Panitia Keuangan dan Ekonomi yang dipimpin Drs. Mohammad Hatta.<sup>13</sup>

Pada tanggal 14 Juli 1945 Badan Penyelidik melakukan sidang membahas tentang pernyataan kemerdekaan yang selanjutnya dibahas dalam rapat. Keputusan rapat pada tanggal 16 Juli 1945 yang disampaikan oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat yaitu

---

<sup>11</sup> Risma Dwi Pangesti, Tri Yuniyanto, and Musa Pelu. 2019. 'Peran Politik Ki Bagus Hadikusumo Tahun 1938-1953 Dan Relevansinya Sebagai Pengembangan Sumber Materi Sejarah Indonesia Baru'. *Jurnal CANDI*, 19, No 2 (2019), 119-42.

<sup>12</sup> Pangesti, Yuniyanto, and Pelu. Hal. 136.

<sup>13</sup> *Ibid* Hal. 136.

Preambul dan batang tubuh Undang-Undang Dasar diterima dengan sebulat-bulatnya. Kemudian sidang Badan Penyelidik dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dookuritsu Junbi Inkai*. PPKI beranggotakan 27 orang dengan komposisi 4 anggota dari kalangan Islam yaitu Ki Bagus Hadikusumo, K.H.A. Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. T.M. Hasan.<sup>14</sup>

Tanggal 16 Agustus 1945 dilaksanakan rapat pertama PPKI di rumah Laksamana Muda Maeda yang dihadiri oleh pemuda diantaranya adalah Sukarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah dan golongan tua seperti Dr. Buntaran dan Semaun Bakri. Hasil rapat PPKI ini menghasilkan keputusan yaitu tersusunnya teks Proklamasi yang ditanda tangani oleh Soekarno dan Moh. Hatta yang mewakili bangsa Indonesia. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang Pejambon yang mengusulkan klausul tujuh kata dalam Piagam Jakarta untuk dihapuskan. Hal ini menjadi perdebatan karena Islam tidak menyetujuinya. Ki Bagus Hadikusumo tetap kokoh pada pendiriannya. Lalu Mr. Kasman Singodimedjo menjelaskan dengan bahasa Jawa halus tentang kebijakan Ki Bagus Hadikusumo jika menyetujui penghapusan tujuh kata tersebut akhirnya luluh.<sup>15</sup>

Setelah usai perdebatan tentang Klausul tujuh lalu sidang dimulai. Mohammad Hatta menyampaikan usulan tentang perubahan Muqaddimah dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar dari hasil keputusan Badan Penyelidik yang isinya sebagai berikut:

- a. Istilah muqaddimah diganti dengan Pembukaan.
- b. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapuskan dalam pasal 29 ayat 1.

## **3.2. Muhammadiyah dan Politik/Masyumi**

### **3.2.1. Riwayat Hidup Ki Bagus Hadikusumo**

Ki Bagus Hadikusumo dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 24 November 1890 atau 11 Rabi'ul Akhir 1308 H dengan nama Raden Hidayat. Ayahnya bernama Raden Kaju Lurah Hasyim, seorang pejabat kesultanan Yogyakarta yang menangani administrasi. Di samping belajar shalat dan mengaji dari orang tuanya, Hidayat juga bersekolah di sekolah formal tingkat dasar *Volks School Gubernemen*. Beliau juga merupakan santri K.H Ahmad Dahlan yang kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Wonokromo dan belajar agama di Mekah selama dua tahun dengan mempelajari kitab-kitab kuning, Kitab Fikih dan tasawuf. Kitab-kitab yang pernah Ki Bagus Hadikusumo pelajari antara lain kitab-kitab dari ulama pembaharu seperti Muhammad Abduh, kitab Tafsir Al Manar, kitab Ibnu Taimiyah, kitab Imam Ghazali, kitab Ibnu Rusyd dan lain-lain. Selain belajar agama di Pesantren, Ki Bagus

---

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 137.

<sup>15</sup> Risma Dwi Pangesti, Tri Yuniyanto, and Musa Pelu. 2019. 'Peran Politik Ki Bagus Hadikusumo Tahun 1938-1953 Dan Relevansinya Sebagai Pengembangan Sumber Materi Sejarah Indonesia Baru'. Jurnal CANDI, 19.2 (2019), 119-142.

Hadikusumo juga belajar sastra Jawa, Melayu, Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris<sup>16</sup>. Setelah menikah, nama Hidayat diganti dengan Ki Bagus Hadikusumo.

Pengajaran Ki Bagus Hadikusumo menggabungkan pembelajaran sekolah formal dengan pengajaran non formal di pondok pesantren menjadikan beliau sebagai orang alim yang berwawasan, seorang muballig dan pemimpin umat yang semangat mempelajari banyak ilmu baik ilmu agama maupun ilmu umum. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman Wahid: “Buku-buku Tasawuf yang menggabungkan fiqih dengan amal-amal akhlaq merupakan bahan pelajaran utama. Misalnya Kitab Bidayatul Hidayah karya Fiqih-Sufistik Imam Ghazali. Hal itu mempengaruhi pola pikir Ki Bagus Hadikusumo, sehingga menghasilkan karya berupa buku dengan judul Poestaka Ihsan. Selain itu, Ki Bagus Hadikusumo juga belajar tentang perbandingan agama dan kristalogi pemikiran Ahmad Dahlan. Banyak ilmu yang didapatkan dari Ahmad Dahlan yang digunakan untuk meneruskan dakwah dan perjuangan dalam Muhammadiyah<sup>17</sup>

Ki Bagus Hadikusumo bergabung pula dengan organisasi Muhammadiyah, pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh (1922), Ketua Majelis Tarjih, anggota Komisi MPM *Hoofdbestuur* (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah (1926), dan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah (1942-1953). Tahun 1922 Gubernur Jendral Hindia Belanda membentuk Komisi Perbaikan *Priesterrad* atau *Raad Agama* yang diketuai oleh Husein Jayadiningrat dan salah satu anggotanya adalah KH Ahmad Dahlan. Ketika Dahlan meninggal dunia, posisinya dalam komisi digantikan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Dalam komisi ini Hadikusumo berusaha tidak saja mendudukan hukum Islam pada posisi yang tinggi dalam negara kolonial, tetapi juga memperkokoh institusi kehukuman Islam. Ketika Hadikusumo diangkat menjadi Ketua Muhammadiyah, beliau berhasil menggali dasar ideologi bagi gerakan. Pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan diolah, dirumuskan sedemikian rupa oleh Hadikusumo menjadi Muqaddimah Anggaran Dasar perserikatan yang kemudian menjadi petunjuk arah gerak Muhammadiyah. Mendapat inspirasi dari muqaddimah ini, Hamka misalnya merumuskan dua landasan idiil Muhammadiyah, yaitu Matan Kepribadian Muhammadiyah dan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.

Tahun 1938, Ki Bagus Hadikusumo bersama Mas Mansur, Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dan Abdul Kahar Muzakir mendirikan Partai Islam Indonesia (PII). Ia juga terlibat dalam pendirian Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937. Pada tahun 1943 Hadikusumo memprakarsai pula pendirian Gerakan Rakyat Islam yang direstui Jepang yang diberi nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang merupakan kelanjutan dari organisasi federasi Islam yang mendahuluinya, MIAI. Masyumi menjadi organisasi yang mempersatukan organisasi-organisasi Islam dengan inti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Ketika merdeka Masyumi berkembang lebih populer setelah Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada bulan Nopember 1945 memutuskan nama ini sebagai satu-satunya partai politik Islam dalam menyalurkan aspirasi politik umat Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Qisthi Faradina Ilma Mahanani. Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo Tentang Islam dan Negara dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953). *Jurnal El Tarikh*. Hal. 4.

<sup>17</sup> Ibid Hal 4

<sup>18</sup> Muhammad Hisyam. 2011. *Ki Bagus Hadikusumo dan Program Relasi Agama Negara*. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 13 No. 2 Tahun 2011 Hal. 4-8.

### 3.2.2. Ki Bagus Hadikusumo dan *Seikerei*

Pada masa penjajahan Jepang, Jepang tidak hanya melakukan doktrinasi dan penguasaan terhadap bidang pendidikan saja. Politik Jepang sangat sedikit mempertimbangkan Islam dalam tingkat sosio-religius. Artinya, Islam dalam hal perkembangan keagamaannya kurang mendapat dukungan dari Jepang. Salah satu kewajiban yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada rakyat Indonesia pada saat itu yaitu melakukan upacara ritual *Seikerei*. *Seikerei* adalah sikap menghormat dan membungkukkan badan ke arah matahari terbit setiap pagi 90<sup>0</sup>, setiap pertemuan umum, dan setiap nama Tenno Haika, Kaisar Jepang, disebut. Sejumlah ulama dengan gagah berani menolak melakukan hal itu. Sebut saja Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat KH Zaenal Mustafa, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Alasan yang dikemukakan pun senada, *seikerei* bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid dan merupakan suatu perbuatan syirik.

Perlawanan Ki Bagoes Hadikoesoemo untuk menolak *seikerei* diwujudkan saat pimpinan Muhammadiyah periode 1942-1953 itu menerbitkan maklumat yang ditujukan kepada umat Islam untuk tidak melakukan *seikerei*. Larangan melakukan *seikerei* didengar pimpinan Kempeitai. Kempeitai adalah Satuan Polisi Militer Jepang yang ditempatkan di seluruh wilayah Jepang termasuk daerah jajahan. Kempeitai pun memanggil Ki Bagoes untuk menghadap Kempeitai di Yogyakarta. Ki Bagoes kemudian memenuhi panggilan Kempeitai, diterima oleh Kepala Kempeitai Kolonel Tsuda. Apa yang terjadi dalam pertemuan itu? Di salah satu sudut ruangan tempat digelarnya Pameran Tokoh Ki Bagoes Hadikoesoemo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, terpampang percakapan antara Ki Bagoes dengan Kolonel Tsuda.<sup>19</sup> Percakapan berhenti sampai di situ. Bahkan, keduanya minum teh bersama. Ki Bagoes pulang dan bersujud syukur karena Jepang tidak berhasil menaklukkan hatinya dan tidak pula berani memerintahkan kekerasan agar umat Islam melakukan *seikerei*.

### 3.2.3. Islam, Politik dan Demokrasi

Pembahasan mengenai hubungan Islam dan ketatanegaraan selama ini menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas. Pandangan mengenai masalah hubungan agama dan negara terbagi dalam tiga paradigma. Pertama, paradigma yang menyatakan

---

<sup>19</sup> "Tuan Ki Bagoes, saya minta kepada semua orang Islam dan Muhammadiyah agar melakukan upacara *seikerei*!" kata Tsuda. Ki Bagoes menjawab, "Tidak mungkin Tuan. Agama Islam melarang." Kolonel Tsuda tak terima. Dia kembali meminta agar Ki Bagoes memerintahkan rakyat untuk melakukan *seikerei*.

"Kalau tidak tahu, maka saya beritahu bahwa membungkuk kepada sesama manusia itu dilarang oleh agama saya," jawab Ki Bagoes. Sang Kolonel tetap tak terima. Dia kembali menegaskan bahwa *seikerei* itu sebuah perintah dan wajib dilaksanakan. Tetapi, Ki Bagoes tetap pada pendiriannya. Malah, pria yang lahir dengan nama R Dayat atau Hidayat itu meminta agar Kolonel Tsuda yang memerintahkan langsung. Kolonel Tsuda pun menggelengkan kepalanya. "Tidak, Tuan Ki Bagoes yang memerintahkan. Tuan pemimpin Islam, orang Islam akan menurut." "Tidak bisa Tuan. Agama melarang. Saya tidak bisa memerintahkan itu," jawab anak dari Raden Kaji Lurah Hasyim yang menjabat sebagai abdi dalem Lurah bidang keagamaan di Keraton Sri Sultan Hamengku Buwono VIII itu. Mendengar jawaban Ki Bagoes, Kolonel Tsuda menggebrak meja. Ki Bagoes pun terkejut. Dia mencoba tenang, lalu mengatakan, "Tuan menganut agama seperti saya, sekalipun berlainan. Tentu Tuan juga tidak mau melanggar ajaran agama Tuan. Seperti kami orang Islam tidak mau melanggar ajaran kami."



bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang terintegrasi atau tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Kedua, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu hal yang saling terkait dan berhubungan (simbiotik). Ketiga, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (sekularistik). Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam ditandai dengan perubahan paradigma yang lebih berorientasi pada isi daripada symbol sehingga ide-ide sosial politiknya lebih bersifat universal.<sup>20</sup>

Politik merupakan salah satu wilayah untuk menegakkan kebenaran dalam konteks pemikiran politik Islam. Hal ini terjadi karena politik dianggap sebagai sesuatu yang efektif untuk melakukan perbaikan kondisi yang ada dalam masyarakat dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pandangan semacam ini sesuai dengan prinsip universal Islam yang tidak memisahkan kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Islam disamping mengajarkan tegaknya nilai-nilai kehidupan dalam diri pribadi dan masyarakat atau negara, juga menganjurkan cara-cara hidup Islam termasuk memperbaiki sistem kehidupan secara umum<sup>21</sup> Istilah demokrasi merupakan salah satu istilah yang familiar dalam dunia politik. Robert N. Bellah sampai pada kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang dikembangkan Nabi Muhammad di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa agama merupakan instrumen Illahi untuk memahami dunia di mana manusia memerlukan pegangan untuk mengarungi kehidupan dunia. Artinya, di mana pun umat Islam berada, Islam hendaknya dijadikan petunjuk bagi perbuatan mereka.<sup>22</sup>

#### **3.2.4. Muhammadiyah dan Dinamika Politik**

Organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 memiliki arti penting dalam politik Indonesia. Meskipun Muhammadiyah tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah organisasi politik, namun Muhammadiyah selalu terlibat dalam pentas politik yang dijalankan dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar*. Perkembangan pentas politik Islam dalam negara tidak bisa lepas dari peran politik Muhammadiyah. Netralitas politik di Muhammadiyah diartikan sebagai tidak bersinggungannya Muhammadiyah secara struktural terhadap sebuah partai politik, menjadi menjadi kerangka untuk melihat bagaimana kiprah Muhammadiyah dalam mempertahankan dirinya sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan. Muhammadiyah merupakan persyarikatan yang tidak pernah terlibat langsung dengan politik praktis.

Keterlibatan Muhammadiyah dengan partai politik di era kemerdekaan terbagi dalam pola hubungan yaitu Muhammadiyah menjadi anggota Masyumi dan Muhammadiyah menjadi inisiator berdirinya Parmusi dalam Tanwir Ponorogo. Dorongan untuk melakukan perubahan orientasi Muhammadiyah ke ranah structural disebabkan karena adanya dorongan dari kepemimpinan Mas Mansyur dan keadaan di mana kekuatan partai politik melemah dengan situasi politik yang cenderung memanas.

---

<sup>20</sup> Novianto Ari Prihatin. Islam dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera. Hal. 72-74.

<sup>21</sup> Syarifuddin Jurdi, 2006. Islam dan Politik Lokal, Studi Krisis Atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah. (Yogyakarta: Pustaka Cendikia, 2006),135.

<sup>22</sup> Novianto Ari Prihatin. Islam dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera. Hal. 76-77.

Pribadi Mas Mansur yang cenderung berminat dalam dunia politik praktis telah berhasil meletakkan konvensi partisipasi politik Muhammadiyah di pentas politik nasional dan kemudian menjadi tradisi yang berlaku bagi Muhammadiyah untuk periode kepemimpinan yang selanjutnya. Selain dari dorongan internal pribadi Mas Mansur, pimpinan lain seperti Haji Sudjak, Faried Ma'ruf dan Abdul Kahar Muzakkir juga memiliki kecenderungan yang sama.<sup>23</sup>

Selain mendirikan MIAI, Muhammadiyah juga menyadari bahwa tidak mungkin dapat memenuhi semua kepentingan dan aspirasi dari Muhammadiyah dalam berdakwah dikalangan terpelajar atau intelektual yang berpendidikan Barat. Dengan melihat kondisi yang seperti itu maka Mas Mansur mendirikan *Islam Studie Club* pada Juli 1938 yang merupakan sebuah forum diskusi yang menjembatani antara kaum intelektual Muslim dan kaum Muslim. Tujuan dari organisasi ini untuk meningkatkan pengetahuan Islam dan juga untuk mempercepat kerjasama antara kaum Muslim dengan intelektual Muslim demi kepentingan Islam di Indonesia. *Islam Studie Club* inilah yang akhirnya akan menjadi embrio bagi lahirnya Partai Islam Indonesia (PII) pada 4 Desember 1938. Pada jaman Jepang, tepatnya pada 1943, MIAI berubah nama menjadi Masyumi dan nama ini diabadikan oleh pemimpin-pemimpin Islam Indonesia pada 7-8 November 1945 dengan mendirikan Partai Islam Masyumi.

### 3.2.5. Partai Masyumi

Partai Masyumi didirikan dan diikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam pada tanggal 7 November 1945 berdasarkan Keputusan Kongres Umat Islam di Yogyakarta yang diselenggarakan 7-8 November 1945, bertepatan dengan 1-2 Dzulhijjah 1346 H. Ide pembentukan partai Masyumi berasal dari beberapa tokoh politik dan gerakan sosial keagamaan Islam diantaranya H. Agus Salim, Prof. Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wachid hasjim, Muhammad Natsir, Muhammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Ki Bagus Hadikusuma, Muhammad Mawardi, dan Dr. Abu Hanifah. Tujuan pembentukan partai ini adalah menegakkan keadulatan negara republik Indonesia dan agama Islam dan melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Masyumi dibentuk sebagai respon langsung terhadap revolusi Indonesia yang sedang bergolak, yaitu tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Masyumi dengan tegas menolak adanya dikotomi urusan agama dan negara, karena bagi Masyumi tegaknya kedaulatan sebuah negara merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama (Islam). Masyumi hendak membentuk Indonesia menjadi negara modern dan demokratis, yaitu negara yang menganut paham egaliter kedaulatan rakyat, keadilan, dan persamaan hak kepada semua warganegara tanpa memandang agama yang dianutnya, tentu dalam naungan Islam.<sup>24</sup>

Perjalanan politik Masyumi tidak berjalan dengan mulus, jika Masyumi diibaratkan sebagai sebuah pesawat terbang maka NU dan Muhammadiyah menjadi kedua sayapnya. Muhammadiyah sebagai sayap modernis, sedangkan NU sebagai sayap

---

<sup>23</sup> Jurnal Polinter Ahmad Sholikin. 2020. Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan Partai Politik Di Indonesia. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta 5, no 2 (202) : 1-7

<sup>24</sup> Novianto Ari Prihatin. Islam dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera. H. 81-82

tradisionalis. Kepengurusan dalam Pimpinan Masyumi lebih banyak didominasi oleh utusan Muhammadiyah yang mencapai lebih dari 50%. Dominasi Muhammadiyah dalam tubuh Masyumi semakin menjadi-jadi setelah banyak anggota Istimewa Masyumi yang keluar, hingga akhirnya Masyumi dibubarkan oleh Soekarno melalui Dekrit Presiden Soekarno pada 1959. Dukyngan maksimal Muhammadiyah kepada Masyumi sangat maksimal yang ditunjukkan melalui kesepakatan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto tahun 1953. Empat kesepakatan yang dibuat oleh PP Muhammadiyah, Majelis Hikmah dan Pimpinan Ranting hingga cabang untuk melakukan Kerjasama dengan Komite Aksi Pemilihan Umum, mengisi negara dengan nafas Islam, megusahakan satu daftar dari golongan Islam dan megusahakan front Dewan dan Konstituante.

Sejak Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 hingga runtuhnya Demokrasi Terpimpin, Muhammadiyah pada khususnya dan Ummat Islam secara umum kehilangan saluran aspirasi politik formal mereka. Hal ini menjadikan Muhammadiyah mengalami tiga pilihan sulit yaitu Muhammadiyah melanjutkan perjuangan untuk melakukan rehabilitasi Masyumi, Muhammadiyah berubah menjadi Partai Politik, atau Muhammadiyah membentuk partai politik Islam baru yang memiliki kesamaan ideologi seperti Masyumi. Akhirnya Muhammadiyah memilih alternatif ketiga dengan ikut membidangi lahirnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 7 April 1967.<sup>25</sup> Dalam perannya di partai Masyumi, Ki Bagus menjabat sebagai wakil ketua dalam majelis syura bersama K.H Wahab Hasbullah, mendampingi K.H Hasyim Asy'ari sebagai Ketuanya. Jabatan itu berakhir hingga Mukhtamar ke-4 di Yogyakarta pada tahun 1950, Ki Bagus Hadikusumo menyebutkan model politik untuk negara Indonesia menjadi 3 model yaitu:

- a. Negara demokrasi Islam, merupakan model negara yang menginginkan terbentuknya negara Islam. Hubungan agama dan negara dalam model ini adalah negara mempunyai peran dalam menentukan kehidupan agama bagi bangsanya. Islam dijadikan dasar negara dengan cara memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam negara melalui proses demokrasi. Namun, model ini kurang pas jika diterapkan dalam negara Indonesia, karena masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, ras dan agama.
- b. Negara demokrasi agama, model kedua ini lebih bersikap terbuka dan netral terhadap agama, tetapi tetap menganggap penting peran agama dalam bernegara.
- c. Negara sekuler. Model ini memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya.

Konsep pemikiran Ki Bagus Hadikusumo dalam hubungan agama dan negara menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara negara dan agama. Agama merupakan pondasi suatu negara. Dengan agama dapat terjaminnya pembangunan pemerintahan yang adil dan mencapai musyawarah. Dalam Al Quran menjelaskan prinsip penting yaitu keadilan, musyawarah dan kebebasan beragama. Tiga prinsip itulah dasar dari sebuah demokrasi dalam bernegara. Dengan demikian Ki Bagus menekankan bahwa

---

<sup>25</sup> Ahmad Sholikin. 2020. Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta* 5, no-2 (2020) : 1-7.

Islam bisa jadi bagian dalam demokrasi bernegara dan ini lebih mengarah ke dalam model negara nomer dua.<sup>26</sup>

Hubungan antara agama dan negara dalam sejarah Islam Indonesia tidak pernah tiada henti. Prinsip yang paling mendasar dalam hubungan antara agama dan negara menjadi pokok perdebatan adalah apakah keduanya dipisahkan atau dipersatukan. Ki Bagus Hadikusumo yang terlibat dalam perjuangan anti sekularisasi negara bersama beberapa pemimpin lainnya berjuang agar Islam masuk dalam negara, bukan melalui jalan paksaan namun melalui mekanisme demokrasi. Ki Bagus Hadikusumo berusaha untuk serius memperhatikan klausul tujuh kata dalam Piagam Jakarta dengan mempertahankan argument kata-kata “menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang merupakan konsep ambigu yang tidak dapat dipahami. Ki Bagus Hadikusumo menyatakan tidak mufakat dengan preambule yang berbunyi “berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya”. Dalam perkembangan lebih lanjut perdebatan bentuk hubungan negara tidak hanya melibatkan golongan Islam dan Kebangsaan, melainkan antara kalangan pemimpin dan intelektual Islam sendiri. Hingga saat ini konsepsi hubungan agama dan negara yang dihasilkan pemikiran intelektual muslim Indonesia memang mencapai tingkat yang maju dalam pengertian ada kesesuaian dengan pemikiran modern tentang demokrasi, pluralism, HAM, persamaan gender, *civil society* dan kebebasan.<sup>27</sup>

### 3.3. Khittahh Perjuangan Muhammadiyah

#### 3.3.1. Pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo mengenai Islam dan Negara

Ki Bagoes Hadikoesoemo merupakan tokoh vokal yang mewakili golongan Islam. Dalam sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945 pukul 15.00 mengeluarkan pernyataan yang intinya “membangun negara di atas dasar ajaran Islam” (Hadikusuma, t.t: 1). Sebanyak enam kali dalam bentuk pernyataan, yaitu sebagai berikut: Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara kita Indonesia ini (Hadikusuma, t.t: 13).

Menurut Ki Bagoes, umat Islam adalah umat yang mempunyai cita-cita yang luhur dan mulia sejak dahulu hingga sekarang ini, seterusnya pada masa yang akan datang, yaitu dimana ada kemungkinan dan kesempatan pastilah umat Islam akan membangunkan negara atau menyusun masyarakat yang didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam (Hadikusuma, t.t: 15). Gagasan Ki Bagoes Hadikoesoemo yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara tersebut didasarkan pada alasan sosiologis-historis dan alasan pemahaman atas ajaran Islam.

Secara sosiologis-historis, menurut Ki Bagoes Hadikoesoemo, agama Islam paling tidak sudah enam abad menjadi agama bangsa Indonesia, atau setidaknya sudah tiga abad sebelum Belanda menjajah. Hukum Islam sudah berlaku di Indonesia dengan sebaik-baiknya serta dapat membawa berkah manfaat dan maslahat bagi rakyat umumnya, di dunia dan di akhirat. Banyak sekali hukum Islam yang sudah menjadi

---

<sup>26</sup> Qisthi Faradina Ilma Mahanani. Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo Tentang Islam dan Negara dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953). *Jurnal El Tarikh* Hal. 8-9.

<sup>27</sup> Muhammad Hisyam. Ki Bagus Hadikusumo dan Problem Relasi Agama-Negara. *Jurnal Masyarakat Budaya*, 13. No. 2 (2011) : 1-28

adat-istiadat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dasar negara Indonesia dengan Jiwa rakyatnya, kata Ki Bagoes Hadikoesoemo, “Tuan-tuan harus mengetahui betul-betul adanya jiwa ke-Islaman rakyat” (Hadikusuma, t.t: 19-20). Ki Bagoes Hadikoesoemo meminta agar tidak salah dalam membaca dan merekam aspirasi penduduknya. Selengkapny Ki Bagoes Hadikoesoemo (t.t: 21) mengatakan:

*Selamilah jiwa rakyat sedalam-dalamnya untuk menjadi dasar tata negara kita, supaya nanti negara kita ini dapat menjadi negara yang kuat dan sentosa. Tinggalah di desa-desa dan di kampung-kampung untuk mengetahui keadaan jiwa dan kehidupan murba (rakyat banyak) yang sebenar-benarnya. Disitu tentu tuan-tuan nanti akan mendapati bahwa rakyat yang terbanyak memang berjiwa Islam.*

Lebih lanjut Ki Bagoes menguraikan bagaimana jiwa Islam itu tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dari adanya pengaruh agama Islam yang sangat kuat dan mendalam pada rakyat Indonesia. Pada bagian lain, Ki Bagoes Hadikoesoemo menyatakan kekhawatirannya apabila negara ini tidak berdiri diatas agama Islam. Bila demikian halnya, menurutnya, mayoritas penduduk yang muslim ini akan bersikap dingin, pasif dan tidak mengambil peran pro-aktif dalam pembangunan (Hadikusuma, t.t: 22). Pandangan sosiologis-historis Ki Bagoes Hadikoesoemo sebagai landasan tesisnya tentang Islam sebagai dasar negara ternyata cocok dengan pandangan mitra selembaga, Muzakir. Menurut Muzakir (Syaifullah, 2015: 75), Islam yang tersiar di Indonesia dan Melayu sejak lebih dari tujuh abad silam merupakan suatu kenyataan tidak dapat dibantah. Bahwa hampir 90 persen bangsa Indonesia dan Melayu telah meninggalkan agama nenek moyang mereka dan memeluk agama Islam.

Alasan pemahaman atas ajaran Islam bagi Ki Bagoes Hadikoesoemo, Islam dijadikan dasar negara berdasar pada pemahaman atas ajaran Islam secara substansial dan menyeluruh, Baginya, substansi dan sistematika ajaran Islam meliputi: iman, ibadah, amal saleh dan jihad. Empat aspek ajaran ini merupakan ringkasan ajaran Islam yang telah diajarkan dan dipimpinkan oleh para *nabiyullah* dalam rangka memperbaiki masyarakat atau negara.

### **3.3.2. Pemikiran Ki Bagoes Hadikusumo tentang *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur***

Pemikiran mengenai konsep *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* pertama kali ditafsirkan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo. Hal ini dibenarkan oleh Muhammad Nuski salah satu cucu Ki Bagoes Hadikoesoemo. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh peneliti bahwa konsep *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* ini kemudian menjadi akar dari lahirnya berbagai konsep negara menurut Muhammadiyah karena pada semua konsep negara yang dilahirkan oleh Muhammadiyah, selalu ditunjukkan pada tercapainya negara *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.

Sebagaimana yang tertuang dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* diartikan sebagai “suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun”. Tafsir mengenai *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* dibahas secara mendalam dalam bukunya Ki Bagoes Hadikoesoemo yang berjudul “Islam sebagai Dasar Negara dan Achlaq Pemimpin”. Oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo istilah

*Baldatun Thajjibah* diartikan sebagai “negeri yang baik”. Thajjibah mengandung arti: berfaedah, bagus dan bersih serta tidak ada mengandung mudarat. *Baldatun Thajjibah* atau Negeri yang baik ialah negeri yang memberi manfaat kepada segenap rakyatnya, bagus dan rapih aturan serta susunannya, bersih dari undang-undang dan perlakuan yang tidak adil, diperintah serta diatur dengan ikhlas bersih dari kepentingan perorangan atau golongan sehingga tidak memberi mudarat kepada rakyat umumnya. Sedangkan *Rabbun Ghafur* ialah Allah yang Maha Pengampun, yang melindungi hamba-Nya yang beriman dan berbuat kebaikan, berbakti kepada-Nya dan mau menerima serta menjunjung tinggi hukum-hukum-Nya.

Menurut pandangan Ki Bagoes Hadikoesoemo negeri yang baik pasti mendapat perlindungan dengan Allah yang Maha Pengampun sebab negeri itu disusun dan diatur dengan berpedoman pada hukum-hukum Allah. Negeri ataupun negara ialah masyarakat yang dibuat dan diatur oleh manusia, diperbaiki dan dimaksudkan oleh manusia juga, dan apabila masyarakat itu rusak binasa maka manusia juga yang merusaknya. Tidak kuasa manusia menahan kerusakan yang dibuat oleh manusia lainnya. Beberapa golongan manusia berkata hendak memperbaiki masyarakat tetapi dalam pratiknya merusak dan menambah keruhnya suasana, baik disengaja atau tidak. Beberapa golongan berkata hendak melindungi, tetapi sebenarnya menganiaya dan memeras. Beberapa golongan berkata akan membela dan menjelmakan keamanan, tetapi sebenarnya untuk mengabdikan kekuasaan dan keunggulannya, serta menambah atau setidaknya menjaga agar daerah kekuasaannya tidak berkurang. Salah satu pihak mengatakan keadaan masyarakat rusak dan buruk, pihak lain mengatakan itulah yang baik dan maju.

Kaitannya dengan kondisi tersebut, menurut Ki Bagus, “manusia memerlukan norma-norma agama yang berisi hukum-hukum Allah, karena bila memakai pendapat manusia tentulah yang diperoleh tidak akan tepat dan benar. Kekacauan dan keributan bukanlah disebabkan perselisihan pendapat manusia, bila manusia telah mau mengembalikan pendapatnya kepada hukum-hukum Allah, bila masyarakat telah diatur dan disusun dengan berpedoman hukum-hukum Allah, niscaya aman dan sejahteralah dunia; itulah juga dikehendaki oleh *Baldatun Thajjibah wa Rabbun Ghafur*. Kedudukan Manusia kepada Hukum Allah menjadi syarat mutlak bagi terciptanya negara yang baik yang berada di bawah perlindungan Allah yang Maha Pengampun. Dalam masyarakat yang agama menjadi dasar dan pedoman, tujuannya tidak hanya diutamakan kepada kesejahteraan lahir yaitu kemakmuran bersama, tetapi juga kesejahteraan batin yang amat dibutuhkan bagi manusia yang hidup. Bahkan dengan tidak adanya kesejahteraan batin, segala ikhtiar untuk mencapai kemakmuran akan sia-sia belaka, oleh karena hanya manusia yang sederhana dalam kebatinannya dapat merasa makmur dan cukup bila keperluan hidupnya telah dipenuhi, dan merasa bersyukur serta rela menolong orang lain bila yang dimiliki ternyata melebihi dari keperluan hidupnya. Tetapi orang yang batinnya tidak aman, tidak akan merasa cukup meskipun yang telah dimilikinya itu berlebih, bahkan dia masih hendak menambah kekayaannya lagi dengan tidak memikirkan nasib kawan-kawannya yang kekurangan, tidak peduli kepada baik atau buruk, halal atau haram, asal dapat menambah hartanya.

Hukum Allah memberi garis dengan jelas yang memisahkan antara kemajuan dan kesesatan serta keruntuhan, pemisahan antara hawa nafsu dan kemaslahatan. Dan Akhirnya hukum Allah mengajarkan bahwa kebangsaan tidak boleh dipergunakan

untuk memecah belahkan manusia karena akan menimbulkan permusuhan atau merengangkan persaudaraan. Makna dan esensi yang terkandung dalam *Baladatun Thajjibah wa Rabbun Ghafur* sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo tersebut menjadi ruh dari pergerakan Muhammadiyah dan sekaligus menjadi akar lahirnya pemikiran Muhammadiyah mengenai konsep negara.

### **3.3.3. Pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam Perumusan Dasar Negara Pancasila**

Dalam proses perumusan dasar negara Pancasila, pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo memberikan sumbangsih yang sangat penting. Perjuangan Ki Bagoes Hadikoesoemo sudah dilakukan sejak menjadi tokoh bangsa yang ditunjuk untuk beraudiensi dengan Kaisar Jepang Tenno Heika di Tokyo pada Februari 1945 mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum keterlibatannya BPUPKI dan PPKI. Keikutsertaan Ki Bagoes Hadikoesoemo merupakan wujud kecintaannya terhadap tanah air dan bangsanya, yang dilanjutkan melalaui pemikirannya dalam merumuskan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 (sore).

Perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo dapat terlihat dalam jalannya sidang BPUPKI. Ki Bagoes Hadikoesoemo sangat aktif menyuarakan aspirasi Islam sebagai dasar negara. Menurut pemikirannya pada dasarnya agama Islam mengandung 5 prinsip seperti yang disampaikannya pada sidang BPUPKI periode pertama, yaitu:

- 1) Islam mengajarkan persatuan atas dasar persaudaraan yang kokoh,
- 2) Islam mementingkan perekonomian dan mengatur pertahanan negara,
- 3) Islam membantu membentuk pemerintahan yang adil dan menegakan keadilan,
- 4) Islam tidak bertentangan bahkan sesuai dengan kebangsaan Indonesia, Islam membentuk potensi lahir dan batin serta semangat kemerdekaan yang menyala.

Dari apa yang di sampaikan oleh Teuku Mohammad Hassan mengenai teguhnya pendirian Ki Bagoes Hadikoesoemo, juga dibenarkan mengenai Kasman Singodimedjo yang membujuk Ki Bagoes Hadikoesoemo agar mau merelakan tujuh kata tersebut dihilangkan. Sedangkan Kasman Singodimedjo juga membenarkan dengan menyatakan bahwa istilah “Yang Maha Esa” adalah amandemen yang berasal dari (diajukan oleh) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Jika menilik apa yang terangkum di atas maka dapat dikatakan bahwa Ki Bagoes Hadikoesoemo merupakan seseorang penentu dan seseorang yang memegang peranan penting dalam menentukan “Ya atau Tidaknya” pencoretan 7 kata yang dipandang prinsip itu, dan merumuskan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai penggantinya. Dipahami pula bahwa Ki Bagoes Hadikoesoemo bisa disebut sebagai pemegang kunci kedaulatan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya menurut Projokusumo (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013:75) bahwa kunci Pancasila sebetulnya ada di tangan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Jika kunci Pancasila ini tidak diberikan, jika Ki Bagoes Hadikoesoemo menolak usulan pencoretan “tujuh kata” dan jika Ki Bagoes Hadikoesoemo memimpin sebuah perlawanan kepada negara, seperti yang dilakukan oleh Kartosuwiryo karena kekecewaan terhadap proses politik yang terjadi, maka sejarah perkembangan bangsa dan negara Indonesia akan berbeda. Meskipun secara

pribadi kecewa, tetapi Ki Bagoes Hadikoesoemo tetap tampil sebagai seorang pemimpin Muslim patriotik dan nasionalis yang sederhana dan ulet yang telah memberikan sumbangan politik dan konstitusional yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.

#### 4. Simpulan.

Indonesia sebagai negara jajahan mengalami banyak tekanan buruk. Tidak ada hak untuk berpendapat, melawan, ataupun berpolitik. Muhammadiyah merupakan salah organisasi sebagai agen perubahan yang menginginkan gerakannya sebagai gerakan Islam non-politik, tetapi tidak anti politik. Kemerdekaan Indonesia diraih tidak lepas berkat jasa Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo sebagai tokoh Muhammadiyah ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Ki Bagus Hadi Kusumo menjalankan perannya sebagai ketua Muhammadiyah dengan pemikiran-pemikiran yang modern. Tidak hanya mementingkan keagamaan saja, tetapi juga membantu proses kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanan perpolitikan Muhammadiyah berperan dalam Masyumi yang merupakan satu-satunya partai Islam yang diakui hingga dibubarkan pada Dekrit Presiden di era demokrasi terpimpin.

Ki Bagus Hadikusumo menyebutkan model politik untuk negara Indonesia menjadi 3 model yaitu Negara demokrasi Islam, Negara demokrasi agama, dan negara sekuler. Perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo terlihat dari keaktifan menyuarakan aspirasi Islam sebagai dasar negara. Pada dasarnya Islam mengandung 5 prinsip seperti yang disampaikan pada sidang BPUPKI yaitu mengajarkan persatuan atas dasar persaudaraan yang kokoh, mementingkan perekonomian dan mengatur pertahanan negara, membantu membentuk pemerintahan yang adil dan menegakan keadilan, dan tidak bertentangan bahkan sesuai dengan kebangsaan Indonesia, serta membentuk potensi lahir dan batin serta semangat kemerdekaan yang menyala

#### Daftar Pustaka.

- Ahmad Sholikin. *Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan Partai Politik Di Indonesia. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta* 5, no.2 (2020) : 1-7.
- Anshari, E.S, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997,
- Bahar, S., A.B. Kusuma, dan N. Hudawati. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Burhan Bungin. *Metodelogi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Engelen O. E, dkk. *Lahirnya Satu Bangsa dan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997.



- George McT Kahin. *Nasionalisme and Revolution in Indonesia*. Ithaca NY : Cornell University Press, 1952.
- Hadikoesoema, Ki Bagus, *Islam sebagai Dasar Negara dan Achlaq Pemimpin*. Yogyakarta: Pustaka Rahaju.
- Hadikusuma, Djarnawi. *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan, dan Buah Pikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo*. Yogyakarta: Persatuan, 1973.
- Hadikusuma, Djarnawi. *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*. Yogyakarta: Persatuan. 1979
- Irfan S. Awwas Trilogi. *Kepemimpinan Negara Islam Indonesia*. Yogyakarta: Uswah. 2008.
- Kartodirjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Kartodirjo, Sartono. *Sejak Indische sampai Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2005
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, Sage Publications, 1985.
- Miles, M.B. & Huberman, A. M. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dari judul *Qualitative Data Anlysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Moedjanto, G. 1998. *Indonesia Abad Ke-20 1: Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad Hisyam. *Ki Bagus Hadikusumo dan Program Relasi Agama Negara*. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 13 No. 2 Tahun 2011
- Novianto Ari Prihatin. *Islam dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam Studi Kasus Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera*.
- PP Muhammadiyah. *Dari Muhammadiyah untuk Indonesia: Peran dan Kiprah Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan K.H. Abdul Kahar Mudzakkir*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Qisthi Faradina Ilma Mahanani. *Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo Tentang Islam dan Negara dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953)*. *Jurnal El Tarikh*.
- Risma Dwi Pangesti, Tri Yuniyanto, and Musa Pelu. *Peran Politik Ki Bagus Hadikusumo Tahun 1938-1953 Dan Relevansinya Sebagai Pengembangan Sumber Materi Sejarah Indonesia Baru*. *Jurnal CANDI 19*, no.2. (2019)
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2011
- Syaifullah. *Pergeseran Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2015
- Syarifuddin Jurdi, *Islam dan Politik Lokal, Studi Krisis Atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah*. Yogyakarta: Pustaka Cendikia, 2006
- Yusuf, H, 2012. *Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer: Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global*. *TAPIS*. 8, no 2 (2012)